



TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN TEKNOKRATIS DI TIONGKOK ERA XI JINPING: IMPLIKASI TERHADAP KETAHANAN DAN PEMBANGUNAN INDONESIA

*THE TRANSFORMATION OF TECHNOCRATIC LEADERSHIP IN CHINA DURING THE XI
JINPING ERA: IMPLICATIONS FOR INDONESIA'S RESILIENCE AND DEVELOPMENT*

**Victor Jacob Lucas Lapulalan¹, Ari Susiono², Tarsisius Susilo³, Agus Soeprianto⁴,
Wahyu Tunggul Wiratama⁵**

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia, Indonesia

Email: victorjllapulalan1978@gmail.com¹, ari745herky70@gmail.com², muchsus70@gmail.com³,
agussoeprianto026@gmail.com⁴, wahyuwira421@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini membahas transformasi kepemimpinan teknokratis di Tiongkok pada era Xi Jinping dan implikasinya terhadap ketahanan serta pembangunan Indonesia. Tujuan utama kajian ini adalah mengungkap karakteristik kepemimpinan Xi yang memadukan teknokrasi, sentralisasi politik, dan penguatan ideologi, serta menganalisis bagaimana dinamika tersebut berpengaruh terhadap peluang dan tantangan bagi Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis literature review dengan menelaah literatur akademik, dokumen kebijakan, dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan teknokratis Xi menghasilkan paradoks: di satu sisi meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperluas pengaruh global Tiongkok, namun di sisi lain menimbulkan risiko ketergantungan ekonomi, tekanan geopolitik, dan potensi erosi prinsip demokratis. Bagi Indonesia, hal ini membuka peluang pembangunan melalui inisiatif Belt and Road, tetapi juga menghadirkan tantangan serius terhadap kedaulatan maritim dan kemandirian strategis. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur kepemimpinan teknokratis dengan menekankan implikasinya lintas negara, sekaligus memberikan masukan strategis bagi Indonesia untuk merumuskan respons adaptif melalui diversifikasi kemitraan dan penguatan kapasitas ketahanan nasional.

Kata Kunci: kepemimpinan teknokratis, Xi Jinping, ketahanan nasional, pembangunan, Indonesia.

ABSTRACT

This study investigates the transformation of technocratic leadership in China under Xi Jinping and its implications for Indonesia's resilience and development. Xi's leadership, characterized by the fusion of technocratic competence, political centralization, and ideological consolidation, generates a paradox: while it enhances bureaucratic efficiency and strengthens China's global influence, it also creates risks of economic dependency, geopolitical pressure, and erosion of democratic principles. For Indonesia, this transformation offers development opportunities through initiatives such as the Belt and Road, yet simultaneously poses challenges to maritime sovereignty and strategic autonomy. By employing a qualitative literature review of academic studies, policy documents, and relevant publications, this research contributes to the discourse on technocratic leadership by underscoring its cross-national consequences and provides practical insights for Indonesia to formulate adaptive responses through partnership diversification, institutional strengthening, and enhanced national resilience.

Keywords: technocratic leadership, Xi Jinping, national resilience, development, Indonesia

PENDAHULUAN

Perubahan lanskap politik dan ekonomi global dalam dua dekade terakhir semakin

menegaskan urgensi memahami dinamika kepemimpinan di Tiongkok, khususnya pada era Xi Jinping. Sebagai kekuatan ekonomi



terbesar kedua di dunia, Tiongkok tidak hanya menunjukkan kebangkitan ekonomi yang pesat, tetapi juga memperlihatkan bentuk konsolidasi politik yang khas, yang berpijak pada kepemimpinan teknokratis sekaligus kontrol partai yang ketat (Guo, 2020). Meskipun tradisi teknokrasi bukan hal baru dalam sejarah kepemimpinan Tiongkok, Xi Jinping menghadirkan pola transformasi yang berbeda dengan mengintegrasikan basis teknokratis dengan penguatan ideologi partai (Tsang & Cheung, 2022). Model kepemimpinan ini tidak hanya merepresentasikan kesinambungan dari praktik sebelumnya, tetapi juga menandai pergeseran menuju sentralisasi kekuasaan yang lebih ideologis dan strategis. Dinamika tersebut memiliki implikasi signifikan bagi negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, yang di satu sisi menggantungkan kepentingan pada hubungan ekonomi-politik dengan Tiongkok, namun di sisi lain dituntut untuk memperkuat ketahanan nasionalnya.

Studi awal mengenai teknokratisasi politik di Tiongkok menunjukkan bahwa sejak Komite Sentral ke-15 pada era Jiang Zemin, teknokrat telah menjadi aktor dominan dalam struktur politik (Zemin et al., 1998). Namun, kepemimpinan Xi Jinping melampaui pola teknokrasi klasik dengan memadukan keahlian teknokratik dengan kontrol personal, praktik klientelisme politik, serta sentralisasi kekuasaan yang ketat (Doyon, 2018; Kazuko, 2020). Dalam kerangka ini, Xi tidak sekadar bergantung pada kapasitas teknokrat, tetapi juga memperkuat supremasi Partai dalam setiap lini pemerintahan, membentuk apa yang dapat disebut sebagai model partokrasi teknokratis (Guo, 2020). Pola tersebut menandai pergeseran menuju bentuk “neo-totalitarianisme” (Brown & Bērziņa-Čerenkova, 2018), yang di satu sisi

memperkuat stabilitas internal, namun di sisi lain menimbulkan potensi risiko terhadap kapasitas pemerintahan jangka panjang (Gueorguiev, 2018). Konsentrasi kekuasaan ini turut berdampak pada konsistensi kebijakan luar negeri Tiongkok, yang semakin tegas, ekspansionis, dan terefleksikan dalam konsep *major country diplomacy* (Hu, 2019).

Bagi Indonesia, transformasi kepemimpinan di Tiongkok membawa implikasi strategis yang luas. Pertama, pada dimensi ekonomi, keterlibatan Indonesia dalam jejaring *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diinisiasi Tiongkok membuka peluang percepatan pembangunan infrastruktur, namun sekaligus menghadirkan risiko ketergantungan dan potensi kerentanan dalam tata kelola nasional (Yoshimatsu, 2022). Kedua, pada ranah politik, gaya kepemimpinan Xi yang sentralistik dan berbasis ideologi turut memengaruhi pola interaksi diplomatik di Asia Tenggara, dengan implikasi langsung bagi stabilitas kawasan (Rameshan, 2024). Ketiga, pada aspek pertahanan, posisi Tiongkok yang dominan dalam dinamika Laut Tiongkok Selatan menimbulkan tantangan serius bagi kedaulatan maritim Indonesia (Fitriani, 2021; Yeremia, 2022). Dengan demikian, analisis mengenai transformasi kepemimpinan teknokratis Tiongkok di bawah Xi Jinping tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga signifikansi praktis dalam memahami arah kebijakan pembangunan nasional dan strategi ketahanan Indonesia.

Meskipun literatur mengenai kepemimpinan Xi Jinping cukup melimpah, terdapat sejumlah kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Pertama, sebagian besar kajian masih berfokus pada dinamika politik domestik Tiongkok, seperti konsolidasi kekuasaan, sentralisasi, dan



penguatan ideologi (Brown & Bērziņa-Čerenkova, 2018; Hameiri & Jones, 2016; Lee, 2017), sementara hanya sedikit yang secara langsung menelaah implikasi transformasi kepemimpinan Xi terhadap negara-negara berkembang di kawasan, khususnya Indonesia. Kedua, kajian mengenai teknokrasi Tiongkok umumnya berhenti pada analisis komposisi elite (Zemin et al., 1998) atau konsep partokrasi (Guo, 2020), tanpa menelaah konsekuensinya terhadap strategi ketahanan negara lain. Ketiga, penelitian yang mengaitkan model kepemimpinan teknokratis Tiongkok dengan aspek pembangunan inklusif di Indonesia masih terbatas, terutama dalam konteks ketahanan ekonomi, energi, dan pangan (Ayu Mutia et al., 2022; Chaireni et al., 2020). Dengan demikian, kesenjangan ini membuka peluang bagi penelitian yang menelaah keterhubungan antara transformasi kepemimpinan teknokratis Xi Jinping dan implikasinya terhadap pembangunan serta ketahanan Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis transformasi kepemimpinan teknokratis di Tiongkok pada era Xi Jinping serta mengeksplorasi implikasinya terhadap pembangunan dan ketahanan Indonesia. Secara khusus, artikel ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana karakteristik dan dinamika transformasi kepemimpinan teknokratis di Tiongkok di bawah Xi Jinping; (2) bagaimana transformasi tersebut memengaruhi pola hubungan Tiongkok dengan negara-negara kawasan, khususnya Indonesia; dan (3) apa implikasi langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkannya terhadap ketahanan dan pembangunan Indonesia. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

teoritis dalam memperkaya pemahaman mengenai keterkaitan antara model kepemimpinan politik negara besar dan strategi ketahanan negara berkembang, sekaligus menawarkan wawasan praktis bagi perumusan kebijakan Indonesia.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan literatur mengenai kepemimpinan teknokratis Tiongkok dengan studi tentang ketahanan Indonesia, dua ranah kajian yang selama ini berkembang secara terpisah. Kedua, penelitian ini menekankan keterhubungan lintas dimensi politik, ekonomi, dan pertahanan sebagai konsekuensi dari transformasi kepemimpinan Xi Jinping, sehingga melampaui pendekatan yang terbatas pada analisis politik domestik Tiongkok. Ketiga, artikel ini mengedepankan perspektif Indonesia dengan memanfaatkan kajian kontemporer yang menelaah bagaimana perkembangan Tiongkok dipersepsi dan ditanggapi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mereplikasi kajian Barat mengenai Xi Jinping, melainkan menawarkan sudut pandang berbasis konteks Indonesia yang lebih relevan bagi dinamika kawasan.

Kontribusi saintifik artikel ini dapat dipetakan dalam dua ranah utama. Pertama, pada level teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai kepemimpinan teknokratis dengan menambahkan dimensi implikatif terhadap negara lain, khususnya dalam kerangka ketahanan dan pembangunan. Sementara penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada Xi Jinping dari perspektif konsolidasi kekuasaan, ideologi atau model *neo-totalitarianisme*, studi ini mengaitkan aspek-aspek tersebut dengan konsekuensinya



bagi Indonesia. Dengan demikian, artikel ini menawarkan kerangka analisis lintas negara yang lebih komprehensif. Kedua, pada level praktis, penelitian ini memberikan masukan strategis bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam merumuskan arah pembangunan dan pertahanan yang adaptif terhadap dinamika Tiongkok, baik dalam memanfaatkan peluang ekonomi maupun menghadapi potensi ancaman terhadap ketahanan nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori modernisasi (Modernization Theory)

Teori Modernisasi (Modernization Theory) menekankan bahwa pembangunan politik dan ekonomi suatu negara berlangsung melalui pola evolutif yang bergerak dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern (Bernstein, 1971). Proses ini ditandai oleh diferensiasi institusional, rasionalisasi, serta peningkatan kapasitas teknokratis dalam tata kelola (Roxborough, 1988; Tipps, 1973). Dalam kerangka tersebut, kepemimpinan teknokratis dipandang sebagai manifestasi modernisasi politik, di mana keahlian teknis, kapasitas administratif, dan kemampuan manajerial secara bertahap menggantikan dominasi patrimonialisme maupun karisma personal. Studi klasik mengenai elit teknokrat di Tiongkok menunjukkan bahwa transisi kepemimpinan sejak era Deng Xiaoping hingga Jiang Zemin merefleksikan pergeseran menuju birokrasi modern yang berbasis pada keahlian (Zemin et al., 1998). Namun demikian, pada era Xi Jinping, kerangka modernisasi ini memerlukan penajaman lebih lanjut karena modernisasi teknokratis dipadukan dengan konsolidasi ideologi dan sentralisasi kekuasaan.

Dalam literatur kontemporer, kepemimpinan Xi Jinping banyak dikaji dalam kerangka penguatan peran partai dan

sentralisasi otoritas. Dinamika ini, di satu sisi, mendukung modernisasi institusional, tetapi di sisi lain melahirkan paradoks berupa munculnya otoritarianisme baru. Guo, (2020), misalnya, mengkarakterisasi sistem politik Tiongkok di bawah Xi sebagai *partokrasi*, yakni perpaduan antara dominasi partai dan birokrasi teknokratis. Sementara itu, Kang, (2018) menyebut arah perkembangan politik tersebut sebagai bentuk “*neo-totalitarianisme*,” di mana modernisasi justru dikombinasikan dengan kontrol ideologis yang semakin ketat. Fenomena ini menegaskan bahwa modernisasi tidak selalu berlangsung linear menuju demokrasi, melainkan dapat menghasilkan hibriditas antara rasionalisasi teknokratik dan konsentrasi kekuasaan. Dengan demikian, dalam perspektif teori modernisasi, transisi politik Tiongkok menuntut reinterpretasi yang lebih kompleks, sebab modernisasi teknokratik tidak serta merta melemahkan otoritarianisme, tetapi justru berpotensi memperkuatnya (Blühdorn, 2025).

Implikasi Teori Modernisasi juga relevan untuk menjelaskan dampak kepemimpinan teknokratis Xi Jinping terhadap pembangunan dan ketahanan Indonesia. Modernisasi, dalam pengertian luas, tidak hanya mencakup transformasi internal suatu negara, tetapi juga melibatkan interaksi transnasional melalui perdagangan, investasi, dan inisiatif global seperti *Belt and Road Initiative* (Li et al., 2022). Dalam konteks ini, hubungan Indonesia–Tiongkok menunjukkan bahwa modernisasi Tiongkok membawa pengaruh langsung terhadap pola pembangunan nasional Indonesia, baik dalam bentuk peluang investasi infrastruktur maupun potensi risiko ketergantungan ekonomi (Fitriani, 2021). Dari perspektif ketahanan, tantangan tersebut menuntut



Indonesia untuk memperkuat kapasitas domestik di bidang ekonomi, pangan, dan pertahanan sebagai langkah strategis dalam mengelola dampak modernisasi eksternal (Ayu Mutia et al., 2022; Chaireni et al., 2020). Dengan demikian, Teori Modernisasi memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana dinamika global memengaruhi negara berkembang dalam menavigasi proses transformasi strukturalnya.

Teori Ketahanan Nasional (*National Resilience Theory*)

Teori Ketahanan Nasional menekankan kemampuan suatu negara untuk bertahan, beradaptasi, dan terus berkembang di tengah beragam ancaman, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari lingkungan eksternal (Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional)). Konsep ini mencakup dimensi politik, ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan, yang saling berinteraksi secara sistematis untuk menjamin keberlangsungan dan kemandirian negara (Mardhani et al., 2020). Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional berfungsi sebagai landasan strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik regional, termasuk tekanan yang muncul akibat transformasi kepemimpinan Tiongkok di bawah Xi Jinping. Dengan demikian, teori ini relevan sebagai pelengkap perspektif modernisasi, karena memberikan perhatian khusus pada kapasitas negara dalam menjaga stabilitas internal, kedaulatan nasional, dan resiliensi strategis di tengah perubahan global yang dinamis.

Literatur kontemporer menegaskan bahwa ketahanan tidak lagi dipahami sebagai kondisi statis, melainkan sebagai kapasitas adaptif yang senantiasa berkembang seiring dinamika lingkungan strategis. (Sarjito, 2024)

menekankan bahwa integrasi teknologi dalam birokrasi pertahanan menuntut adanya kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mengatasi berbagai hambatan institusional. Perspektif ini menunjukkan bahwa ketahanan negara sangat ditentukan oleh kemampuan kepemimpinan dalam mengelola perubahan dan inovasi. Dalam kerangka penelitian ini, teori ketahanan nasional relevan untuk menjelaskan bagaimana Indonesia perlu merespons dampak modernisasi teknokratis Tiongkok melalui penguatan kapasitas pertahanan, reformasi birokrasi, serta mitigasi risiko ketergantungan struktural. Dengan demikian, ketahanan nasional tidak sekadar bersifat reaktif terhadap ancaman, tetapi juga proaktif dalam membangun kapasitas institusional yang berkelanjutan.

Selain itu, teori ketahanan nasional menekankan keterkaitan yang erat antara pembangunan dan pertahanan. Mutia (2022) menegaskan bahwa ketahanan pangan, sebagai bagian integral dari ketahanan nasional, memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, Chaireni (2020) menunjukkan bahwa tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia memerlukan penyesuaian kebijakan strategis guna memperkuat kapasitas ketahanan jangka panjang. Dalam kaitannya dengan dinamika Tiongkok, proyek-proyek strategis seperti *Belt and Road Initiative* tidak hanya menawarkan peluang ekonomi, tetapi juga menghadirkan potensi ancaman terhadap ketahanan nasional apabila tidak dikelola berdasarkan prinsip kemandirian. Oleh karena itu, teori ketahanan nasional memberikan kerangka analitis yang kritis untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dipengaruhi oleh kepemimpinan teknokratis Tiongkok



berkontribusi pada penguatan atau justru pelemahan ketahanan Indonesia.

Akhirnya, teori ketahanan nasional juga mengandung dimensi normatif yang berfungsi memberikan arah strategis bagi negara dalam menghadapi ketidakpastian global. Setiawan (2022) menegaskan bahwa meskipun Indonesia rentan terhadap tekanan eksternal, negara ini tetap mampu menunjukkan ketangguhan dalam merespons tren penurunan demokrasi global. Temuan tersebut menegaskan bahwa ketahanan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh kapasitas sosial dan politik dalam menjaga legitimasi serta kohesi nasional. Dengan mengintegrasikan teori ketahanan nasional ke dalam analisis, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana Indonesia dapat merespons transformasi kepemimpinan teknokratis Tiongkok secara adaptif, sekaligus memastikan kedaulatan, stabilitas, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review*. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada analisis konseptual yang bersumber dari publikasi ilmiah. Melalui *literature review*, peneliti dapat menelaah, mengkritisi, dan menyintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan (Faizah et al., 2021a), sehingga menghasilkan kerangka konseptual baru dalam memahami fenomena kepemimpinan teknokratis di Tiongkok pada era Xi Jinping serta implikasinya bagi pembangunan dan ketahanan Indonesia. Nur Faizah et al., (2024) menekankan bahwa

literature review tidak sekadar berfungsi sebagai ringkasan literatur, melainkan juga sebagai upaya membangun perspektif baru yang mampu memperluas cakrawala penelitian. Dalam kerangka ini, pendekatan kualitatif dipandang paling tepat karena memungkinkan peneliti memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan interpretatif terhadap data sekunder yang tersedia.

Penggunaan *literature review* sebagai strategi penelitian juga didasarkan pada kenyataan bahwa topik kepemimpinan Xi Jinping telah menjadi perhatian luas para akademisi, baik dari perspektif politik domestik, ekonomi global, maupun hubungan internasional (Brown & Bērziņa-Čerenkova, 2018; Doyon, 2018; Guo, 2020; Kazuko, 2020; Lee, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengulangi temuan-temuan sebelumnya, melainkan untuk mengintegrasikan dan mengontekstualisasikan literatur yang ada dengan isu-isu strategis yang dihadapi Indonesia. Fokus utama penelitian ini terletak pada bagaimana dinamika kepemimpinan Xi Jinping yang bercorak teknokratis sekaligus sentralistik mempengaruhi arah pembangunan dan ketahanan Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas literatur ilmiah yang relevan, meliputi artikel jurnal bereputasi, buku akademik, prosiding, serta laporan penelitian yang telah dipublikasikan (Faizah et al., 2021b; Nur Faizah et al., 2024). Literatur tersebut diperoleh melalui berbagai basis data akademik internasional, seperti Scopus, Web of Science, dan JSTOR, maupun basis data nasional, seperti Garuda dan Neliti. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen resmi serta laporan kebijakan yang terkait dengan isu ketahanan nasional dan dinamika



hubungan Indonesia–Tiongkok sebagai sumber data pelengkap.

Sejalan dengan standar penelitian kualitatif, literatur yang dipilih tidak diperlakukan semata-mata sebagai sumber informasi, melainkan juga sebagai objek analisis kritis (Sakti et al., 2024; Tarjo et al., 2021; Toyyib et al., 2020; Yustin Nur Faizah et al., 2022). Oleh karena itu, proses pengumpulan data dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas publikasi, tingkat relevansi terhadap fokus penelitian, serta kontribusi teoretis maupun praktis yang ditawarkan masing-masing literatur.

Agar proses seleksi literatur berlangsung secara sistematis, penelitian ini menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas. Kriteria inklusi mencakup publikasi yang secara langsung membahas kepemimpinan Tiongkok di bawah Xi Jinping, khususnya yang menyoroti dimensi teknokrasi, sentralisasi kekuasaan, konsolidasi politik, serta implikasi global yang ditimbulkan. Artikel yang mengkaji hubungan Tiongkok dengan Indonesia maupun negara-negara Asia Tenggara, terutama dalam bidang pembangunan ekonomi, kebijakan luar negeri, dan inisiatif *Belt and Road*, juga dimasukkan sebagai literatur utama. Selain itu, literatur yang berfokus pada isu ketahanan nasional Indonesia baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial dipertimbangkan sebagai sumber analisis untuk menghubungkan dinamika kepemimpinan Xi dengan konteks domestik Indonesia. Publikasi yang terbit dalam rentang waktu 1998 hingga 2025 diprioritaskan, dengan penekanan pada periode kepemimpinan Xi (2012–2025). Untuk menjaga konsistensi serta keterbacaan, penelitian ini hanya memasukkan literatur

yang tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ketentuan tersebut dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Fokus topik	Kepemimpinan Xi, teknokrasi, implikasi global, ketahanan Indonesia	Tidak relevan dengan Xi atau ketahanan
Jenis publikasi	Jurnal peer-reviewed, akademik, prosiding, dokumen kebijakan	Artikel populer, opini, berita
Periode publikasi	1998–2025 (fokus 2012–2025)	Di luar rentang waktu
Bahasa	Inggris/Indonesia	Bahasa lain tanpa terjemahan
Relevansi	Kualitas akademik	Deskriptif tanpa analisis

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Sebaliknya, literatur yang tidak memenuhi standar akademik dikecualikan dari analisis. Artikel non-ilmiah, seperti opini media populer atau blog, tidak digunakan karena tidak memiliki dasar metodologis yang kuat. Literatur yang tidak relevan dengan kepemimpinan Xi maupun yang tidak terkait dengan isu ketahanan Indonesia juga tidak dimasukkan. Demikian pula, publikasi yang hanya bersifat deskriptif tanpa memberikan kontribusi konseptual dianggap kurang memadai untuk mendukung analisis penelitian ini. Untuk menjaga konsistensi, publikasi yang tidak dapat diakses secara penuh juga dikecualikan, karena keterbatasan akses berpotensi menghambat kajian yang komprehensif.

Dengan adanya kriteria eksklusi ini, proses seleksi literatur menjadi lebih transparan, sistematis, dan dapat



dipertanggungjawabkan. Seluruh literatur yang terpilih kemudian dikompilasi menggunakan perangkat lunak manajemen referensi, yang tidak hanya memudahkan pengorganisasian sitasi, tetapi juga memastikan akurasi dan konsistensi dalam proses pengutipan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan berurutan. Pencarian literatur dimulai dengan penggunaan kata kunci spesifik, seperti *technocratic leadership in China*, *Xi Jinping governance*, *national resilience Indonesia*, dan *Belt and Road Initiative implications*. Hasil pencarian awal kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, sehingga hanya literatur yang benar-benar relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Proses penyaringan ini menjadi krusial untuk menjaga kualitas dan ketepatan analisis. Artikel yang lolos seleksi awal selanjutnya diunduh, dibaca secara menyeluruh, dan dianalisis baik dari segi isi maupun pendekatan metodologis yang digunakan.

Literatur yang telah terpilih kemudian dimasukkan ke dalam daftar pustaka elektronik dengan memanfaatkan perangkat lunak Mendeley. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi manajemen referensi, menjaga konsistensi, serta meminimalkan risiko kesalahan sitasi. Torraco (2016) menekankan bahwa membaca secara kritis dalam *literature review* tidak hanya penting untuk memahami temuan penelitian, tetapi juga untuk menilai posisi epistemologis, orientasi metodologis, serta kontribusi konseptual dari setiap penulis. Oleh karena itu, proses pengumpulan data dalam penelitian ini tidak berhenti pada tahap pengunduhan literatur, melainkan dilanjutkan dengan

penelaahan kritis guna memastikan relevansi, konsistensi, dan kedalaman analisis yang dihasilkan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) sebagaimana dirumuskan oleh Braun dan Clarke (2006). Metode ini dipilih karena mampu mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasi pola yang muncul dalam data kualitatif secara sistematis. Proses analisis dimulai dengan tahap familiarisasi, yaitu pembacaan berulang terhadap seluruh literatur untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Selanjutnya dilakukan pengkodean awal, di mana konsep-konsep kunci seperti “teknokrasi Xi,” “sentralisasi kekuasaan,” “neo-totalitarianisme,” “*Belt and Road risks*,” dan “ketahanan nasional adaptif” diberi tanda khusus sebagai unit analisis awal.

Kode-kode yang dihasilkan kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema awal, seperti “teknokrasi dan partokrasi,” “implikasi pembangunan Tiongkok terhadap Indonesia,” dan “ketahanan nasional sebagai strategi adaptif.” Pada tahap berikutnya, tema-tema tersebut ditinjau kembali untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan keseluruhan literatur yang dianalisis. Setelah proses peninjauan, setiap tema didefinisikan secara lebih spesifik dan diberi label yang jelas sehingga memudahkan dalam penyusunan narasi konseptual. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan analisis, yang menyajikan sintesis literatur secara sistematis dan diintegrasikan dengan kerangka teori modernisasi serta teori ketahanan nasional.

Penerapan analisis tematik dalam penelitian ini tidak hanya memungkinkan deskripsi atas literatur yang ada, tetapi juga menghasilkan sintesis konseptual yang lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian ini



berkontribusi pada pemahaman yang lebih integratif mengenai keterkaitan antara transformasi kepemimpinan teknokratis di Tiongkok dan implikasinya terhadap strategi pembangunan serta ketahanan Indonesia.

secara sistematis mendokumentasikan seluruh tahapan, mulai dari pencarian literatur, proses seleksi, hingga tahap analisis, sehingga setiap langkah penelitian dapat ditelusuri kembali oleh pembaca.

Reliabilitas penelitian dijaga melalui penerapan konsistensi dalam penggunaan kriteria seleksi literatur, sistem pencatatan kode, serta pengorganisasian data menggunakan perangkat lunak manajemen referensi. Selain itu, peneliti menyusun *audit trail* berupa catatan keputusan analitis, yang memungkinkan proses penelitian direplikasi oleh peneliti lain. Dengan prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan memiliki kredibilitas akademik yang tinggi sekaligus memberikan kontribusi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Gambar 1. Alur Sistematis Pengumpulan Literatur



Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Untuk menjaga validitas, penelitian ini mengintegrasikan literatur dari berbagai sumber dan disiplin, baik internasional maupun nasional, sehingga tercipta triangulasi perspektif yang memperkaya analisis. Snyder (2019) menegaskan bahwa transparansi dalam seleksi literatur serta kejelasan prosedur analisis merupakan faktor kunci dalam memastikan validitas *literature review*. Sejalan dengan itu, penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Dan Dinamika Transformasi Kepemimpinan Teknokratis Di Tiongkok Di Bawah Xi Jinping

Transformasi kepemimpinan di Tiongkok di bawah Xi Jinping menunjukkan dinamika khas yang memadukan tradisi teknokratis dengan konsolidasi politik berbasis partai. Pada periode Deng Xiaoping hingga Jiang Zemin, kepemimpinan teknokratis ditandai oleh dominasi elite berlatar belakang insinyur dan ilmuwan dalam struktur Partai Komunis Tiongkok (PKC), sebagaimana tercermin dalam Komite Sentral ke-15 yang mayoritas anggotanya berasal dari kalangan teknokrat (Zemin et al., 1998). Namun, pada era Xi Jinping, teknokrasi tidak lagi semata berfungsi sebagai basis administratif, melainkan dikombinasikan dengan penguatan kontrol ideologis dan personalisasi kekuasaan. Guo, (2020) menyebut fenomena ini sebagai *partokrasi*,



yakni model kepemimpinan yang mengintegrasikan dominasi partai dengan birokrasi teknokratis. Pergeseran ini menandai transisi dari teknokrasi murni menuju bentuk teknokrasi yang semakin tersentralisasi, di mana kompetensi teknis tidak hanya berfungsi untuk efisiensi pemerintahan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat legitimasi politik sekaligus meneguhkan kendali partai atas negara.

Dinamika kepemimpinan Xi Jinping ditandai oleh intensifikasi sentralisasi kekuasaan. Melalui instrumen seperti kebijakan inspeksi internal (*xunshi*), kampanye anti-korupsi, dan restrukturisasi birokrasi, Xi tidak hanya memperkuat otoritas pribadinya, tetapi juga memantapkan peran Partai Komunis Tiongkok (PKC) sebagai pusat pengendali negara ((Lee, 2017; Tsang & Cheung, 2022). Gueorguiev, (2018) menekankan bahwa konsentrasi kekuasaan di tangan Xi bukan sekadar mempertegas kontrol eksekutif, melainkan juga berimplikasi pada risiko jangka panjang berupa melemahnya kapasitas pemerintahan kolektif. Kontradiksi ini menggambarkan paradoks dalam transformasi teknokratis era Xi: di satu sisi berhasil meningkatkan disiplin dan efektivitas birokrasi, namun di sisi lain membatasi ruang deliberasi politik. Dengan demikian, pola kepemimpinan Xi memperlihatkan hibriditas yang khas, yaitu penggabungan modernisasi administratif dengan praktik otoritarianisme yang semakin mengakar (Brown & Bērziņa-Čerenkova, 2018).

Lebih jauh, kepemimpinan teknokratis Xi Jinping juga membawa implikasi signifikan terhadap orientasi kebijakan luar negeri Tiongkok. Hu (2019) menunjukkan bahwa transformasi gaya kepemimpinan Xi

telah menggeser pendekatan diplomasi Tiongkok dari yang semula bersifat reaktif (*taoguang yanghui*) menuju sikap yang lebih proaktif dan asertif (*fenfa youwei*). Pergeseran ini sejalan dengan doktrin *major country diplomacy*, yang menegaskan ambisi Tiongkok untuk tampil sebagai kekuatan global utama. Dengan demikian, teknokrasi di era Xi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan birokrasi domestik, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam memperluas pengaruh internasional. Dinamika tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan teknokratis Xi bersifat multidimensi, mencakup dimensi politik, administratif, sekaligus diplomasi global.

Untuk memperjelas karakteristik dan dinamika tersebut, penelitian ini menyajikan Tabel 2 yang merangkum dimensi utama kepemimpinan teknokratis Xi sebagaimana ditunjukkan dalam literatur. Tabel ini menegaskan bagaimana Xi berhasil memadukan teknokrasi dengan elemen partokrasi, pola sentralisasi kekuasaan, serta ekspansi diplomatik. Selain itu, Gambar 2 diusulkan sebagai ilustrasi visual yang memperlihatkan alur transformasi dari teknokrasi klasik pada era Jiang Zemin menuju bentuk teknokrasi yang lebih sentralistis dan sarat muatan ideologis pada era Xi Jinping. Visualisasi ini menekankan transisi dari kepemimpinan teknokrat murni menuju model hibrida yang lebih kompleks, di mana kapasitas teknis tidak hanya menopang efektivitas birokrasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik dan proyeksi kekuatan internasional.

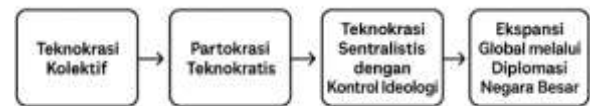
**Tabel 2. Karakteristik Transformasi
Kepemimpinan Teknokratis Xi Jinping**

Dimensi	Era Sebelum Xi (Jiang-Hu)	Era Xi Jinping
Basis teknokrasi	Dominasi elit militer dan sipil	Diteraskan tetapi dikombinasikan dengan penguatan ideologi
Sentralisasi	Relatif kolektif, berbasis konsensus	Sentralisasi personal dan kampanye anti-korupsi
Ideologi	Lebih pragmatis, teknokratik	Mengarah pada neo-otoritarianisme
Kebijakan luar negeri	Reaktif (<i>taoguang yanghui</i>)	Proaktif dan ekspansif (<i>fenfa youwei</i>)



**Gambar 2. Karakteristik Transformasi
Kepemimpinan Teknokratis Xi Jinping**

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)



Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Secara keseluruhan, hasil *literature review* ini menunjukkan bahwa transformasi kepemimpinan teknokratis Xi Jinping bersifat kompleks dan multidimensional. Kepemimpinan Xi tidak hanya meneruskan tradisi teknokrasi yang berakar sejak era Deng Xiaoping, tetapi juga membentuk model baru yang mengintegrasikan kapasitas teknis dengan konsolidasi ideologi dan ekspansi global. Dinamika ini mencerminkan ambivalensi modernisasi di Tiongkok: di satu sisi teknokrasi berfungsi sebagai instrumen rasionalisasi birokrasi, namun di sisi lain dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat kontrol otoritarian. Temuan ini sejalan dengan literatur sebelumnya, tetapi juga menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana kepemimpinan Xi beroperasi secara simultan dalam ranah domestik dan internasional, sehingga memperkaya pemahaman tentang karakteristik hibriditas kepemimpinan Tiongkok kontemporer.

Implikasi Transformasi Kepemimpinan Teknokratis Xi Jinping terhadap Hubungan Regional dan Indonesia

Transformasi kepemimpinan teknokratis Xi Jinping membawa dampak signifikan terhadap konfigurasi hubungan regional di Asia-Pasifik. Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan Xi tidak hanya memperkuat stabilitas domestik, tetapi juga menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri yang lebih asertif melalui kerangka *major country diplomacy* (Hu, 2019). Orientasi baru ini ditandai dengan proaktivitas Tiongkok dalam isu-isu strategis, seperti Laut Tiongkok Selatan, implementasi Belt and Road Initiative (BRI), serta intensifikasi hubungan ekonomi dengan negara-negara ASEAN. Literatur menunjukkan bahwa perubahan tersebut telah menggeser peran Tiongkok dari sekadar aktor ekonomi menjadi kekuatan politik dan militer yang berupaya memengaruhi arsitektur keamanan kawasan (Liu, 2022). Konsekuensinya, negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, menghadapi dilema strategis untuk menjaga keseimbangan antara peluang kerja sama ekonomi dan perlindungan kedaulatan nasional.

Implikasi bagi Indonesia terlihat dalam dua dimensi utama, yaitu pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. Di satu sisi,



BRI membuka peluang investasi besar pada infrastruktur, energi, dan perdagangan, yang dapat mendukung agenda pembangunan Indonesia (Morris, 2023). Namun, di sisi lain, keterlibatan yang terlalu dalam dengan BRI menimbulkan risiko ketergantungan finansial dan potensi erosi kemandirian strategis. Studi Iksan et al., (2025) menegaskan bahwa dari sudut pandang Indonesia, kepemimpinan Xi membawa peluang sekaligus tantangan, karena ekspansi Tiongkok mempersempit ruang manuver diplomatik dan meningkatkan tekanan geopolitik. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi kepemimpinan Xi tidak hanya menjadi isu internal Tiongkok, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap arah pembangunan dan kebijakan pertahanan Indonesia.

Selain dimensi ekonomi, kepemimpinan Xi Jinping juga berimplikasi pada meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan. Kang, (2018) menegaskan bahwa Tiongkok di bawah Xi bergerak menuju bentuk “neo-totalitarianisme” yang menggabungkan kontrol ideologis domestik dengan sikap tegas di arena internasional. Konstelasi ini tercermin dalam kebijakan Tiongkok terhadap sengketa Laut Tiongkok Selatan, yang kerap menimbulkan friksi dengan Indonesia, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif sekitar Natuna. Dengan demikian, implikasi kepemimpinan Xi bagi Indonesia tidak hanya terkait dengan peluang kerja sama pembangunan, tetapi juga menghadirkan tantangan serius terhadap pertahanan dan kedaulatan maritim. Perbandingan dengan literatur tentang ketahanan nasional Indonesia, Sarjito, (2024) mengindikasikan bahwa respons strategis Indonesia perlu diarahkan pada penguatan kapasitas domestik, baik melalui modernisasi alutsista dan sistem pertahanan maupun

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai fondasi ketahanan jangka panjang. Untuk memperjelas temuan penelitian, Tabel 3 menyajikan dimensi utama implikasi kepemimpinan Xi Jinping terhadap Indonesia, sedangkan Gambar 3 menggambarkan keterkaitan antara transformasi kepemimpinan Xi, dinamika regional, dan respons strategis Indonesia. Tabel tersebut menekankan adanya dualitas dalam hubungan Indonesia–Tiongkok, yakni peluang ekonomi yang terbuka melalui intensifikasi kerja sama pembangunan sekaligus risiko geopolitik yang perlu diantisipasi. Sementara itu, Gambar 3 menyajikan alur konseptual yang menunjukkan bagaimana transformasi domestik di Tiongkok berdampak pada konfigurasi regional dan pada akhirnya menuntut respons adaptif dari Indonesia, baik dalam ranah ekonomi maupun keamanan.

Tabel 3. Implikasi Kepmimpinan Xi Jinping terhadap Indonesia

Dimensi	Peluang	Tantangan
Ekonomi	Investasi Belt and Road Initiative (BRI), infrastruktur perdagangan	Ketergantungan finansial, dominasi pasar Tiongkok
Politik	Kerja sama strategis ASEAN–Tiongkok	Tekanan diplomatik, berkembangnya pengaruh maritim politik luar negeri
Pertahanan	Kolaborasi keamanan terbatas di kawasan	Sengketa Laut Tiongkok Selatan, ancaman terhadap kedaulatan maritim

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Gambar 3. Implikasi Kepmimpinan Xi Jinping terhadap Indonesia



Sumber: Data diolah Peneliti (2025)



Secara keseluruhan, hasil literature review ini menunjukkan bahwa transformasi kepemimpinan teknokratis Xi Jinping menghadirkan paradoks bagi Indonesia. Di satu sisi, transformasi tersebut membuka peluang percepatan pembangunan melalui peningkatan integrasi ekonomi dengan Tiongkok. Di sisi lain, hal ini menimbulkan tantangan bagi ketahanan nasional, termasuk risiko ketergantungan ekonomi dan tekanan geopolitik. Dengan demikian, strategi Indonesia perlu difokuskan pada respons adaptif yang mampu menyeimbangkan kerja sama ekonomi dengan perlindungan kedaulatan, sekaligus memperkuat kapasitas ketahanan nasional agar negara tidak terperangkap dalam dinamika hegemoni regional yang dibentuk oleh Tiongkok.

Implikasi Transformasi Kepemimpinan Teknokratis Xi Jinping terhadap Ketahanan dan Pembangunan Indonesia

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa transformasi kepemimpinan teknokratis Xi Jinping memiliki implikasi signifikan terhadap konfigurasi ketahanan dan pembangunan Indonesia, terutama melalui mekanisme politik, ekonomi, dan diplomasi kawasan. Reformasi sistem pemerintahan Tiongkok yang ditandai dengan penguatan partokrasi (Guo, 2020) serta konsentrasi kekuasaan melalui politik personel (Doyon, 2018) membentuk model kepemimpinan yang menekankan efisiensi teknokratis sekaligus pengendalian ketat. Bagi Indonesia, pola ini menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas birokrasi pembangunan agar mampu menyeimbangkan tuntutan efisiensi teknokratis dengan prinsip-prinsip demokratis. Hal ini menjadi semakin relevan dalam konteks implementasi proyek strategis

lintas negara, seperti Belt and Road Initiative (BRI), yang tidak hanya membawa peluang investasi, tetapi juga menuntut tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel (Morris, 2023).

Dari perspektif ketahanan nasional, pendekatan sentralisasi kepemimpinan Xi Jinping yang dipadukan dengan diplomasi negara besar (*major country diplomacy*) menempatkan Indonesia pada posisi yang sekaligus strategis dan rentan. Di satu sisi, Indonesia memperoleh peluang signifikan melalui investasi infrastruktur, energi, dan digitalisasi; namun di sisi lain, terdapat risiko meningkatnya ketergantungan ekonomi maupun politik terhadap Tiongkok (Iksan, Soong & Liang, 2025). Temuan ini konsisten dengan analisis Overholt (2023) yang memproyeksikan perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok di masa mendatang, sehingga Indonesia perlu mengantisipasi potensi kerentanan berupa instabilitas rantai pasok dan ketidakpastian ekonomi global. Dengan demikian, ketahanan Indonesia tidak hanya bergantung pada kapasitas domestik, tetapi juga ditentukan oleh keterhubungannya dengan dinamika teknokratisasi politik-ekonomi Tiongkok.

Implikasi lain tampak pada pembangunan sektor-sektor strategis. Hu (2019) menunjukkan bahwa transformasi kepemimpinan Xi telah mendorong Tiongkok beralih dari strategi diplomasi yang reaktif menuju pendekatan proaktif dalam arena global. Pergeseran ini berdampak langsung pada pola kemitraan Indonesia di bidang pertahanan dan energi, ditandai dengan semakin intensifnya penetrasi Tiongkok melalui proyek-proyek berbasis teknologi tinggi. Namun, Sarjito (2025) menekankan bahwa integrasi teknologi ke dalam birokrasi



pertahanan Indonesia masih dihadapkan pada tantangan berupa resistensi kelembagaan dan keterbatasan kapasitas digital. Oleh karena itu, adopsi model teknokratis ala Xi tidak dapat dilakukan secara mekanis, melainkan harus disesuaikan dengan kapasitas birokrasi nasional agar tidak menciptakan ketergantungan struktural yang berisiko bagi kemandirian strategis Indonesia. Untuk memperjelas posisi Indonesia dalam konteks tersebut, **Tabel 4** berikut menyajikan perbandingan peluang dan tantangan utama yang muncul sebagai konsekuensi dari transformasi kepemimpinan teknokratis Xi Jinping.

Tabel 4. Implikasi Kepemimpinan Teknokratis Xi Jinping terhadap Indonesia

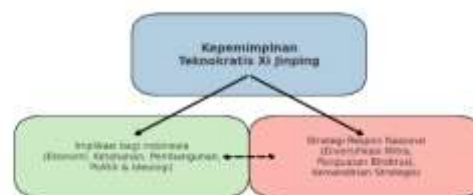
Dimensi	Peluang	Tantangan
Ekonomi	Investasi Belt and Road Initiative (BRI), infrastruktur, dampak perlambatan perdagangan	Risiko ketergantungan ekonomi, perdagangan Tiongkok
Ketahanan Nasional	Akses teknologi, pertahanan, diplomasi strategis Indo-Pasifik	Kemiripan terhadap tekanan geopolitik dan kontrol eksternal
Pembangunan	Transfer teknologi dan manajemen proyek	Resistensi birokrasi, kemandirian kapasitas digital
Ideologi & Politik	Model teknokratis untuk efisiensi kebijakan	Potensi erosi prinsip demokrasi dan akuntabilitas

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa transformasi kepemimpinan teknokratis Xi Jinping membawa efek ganda bagi Indonesia: di satu sisi membuka jalur pembangunan baru, namun di sisi lain meningkatkan kompleksitas risiko yang harus diantisipasi. Sejalan dengan temuan Liu (2022), interaksi multidimensi antara Tiongkok dan Asia Tenggara hanya dapat direspons secara efektif apabila Indonesia

mampu memperkuat tata kelola transnasional, memperluas kapabilitas sosial (Andersson, Axelsson & Palacio, 2021), serta menjaga keseimbangan antara pragmatisme pembangunan dengan kemandirian strategis.

Gambar 4. Peta Konseptual Implikasi Kepemimpinan Teknokratis Xi Jinping Terhadap Pertahanan Indonesia



Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Gambar 4 menyajikan peta konseptual yang menggambarkan hubungan antara kepemimpinan teknokratis Xi Jinping, implikasinya bagi Indonesia, serta strategi respons nasional yang dapat ditempuh. Model teknokratis Xi menghasilkan implikasi multidimensional mencakup aspek ekonomi, ketahanan, pembangunan, hingga ideologi-politik yang menuntut adaptasi berkelanjutan dari Indonesia. Sebagai respons, Indonesia perlu merumuskan strategi yang menekankan diversifikasi kemitraan internasional, penguatan kapasitas birokrasi, dan kemandirian strategis dalam pengambilan keputusan. Hubungan timbal balik antara implikasi dan strategi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas respons nasional akan sangat menentukan sejauh mana Indonesia mampu mengoptimalkan peluang sekaligus memitigasi risiko yang lahir dari transformasi kepemimpinan Xi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi kepemimpinan teknokratis di Tiongkok di bawah Xi Jinping tidak hanya



bersifat administratif, tetapi juga ideologis dan strategis. Kepemimpinan Xi mencerminkan hibriditas antara kompetensi teknokratik, sentralisasi politik, dan ekspansi diplomasi global. Dinamika tersebut menimbulkan paradoks: di satu sisi memperkuat efisiensi birokrasi dan proyeksi internasional Tiongkok, namun di sisi lain meningkatkan risiko otoritarianisme serta menciptakan ketergantungan struktural.

Bagi Indonesia, implikasi dari transformasi ini bersifat multidimensional. Pada ranah ekonomi, keterlibatan dalam Belt and Road Initiative membuka peluang percepatan pembangunan, tetapi sekaligus memunculkan risiko ketergantungan finansial dan pasar. Dalam dimensi pertahanan, dominasi Tiongkok di kawasan, khususnya di Laut Tiongkok Selatan, menghadirkan tantangan nyata terhadap kedaulatan maritim Indonesia. Sementara itu, dalam aspek pembangunan dan birokrasi, model teknokratis Xi dapat menjadi inspirasi efisiensi, meskipun tetap menuntut adaptasi agar tidak mengikis prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas literatur mengenai kepemimpinan teknokratis dengan menghubungkannya secara langsung dengan isu ketahanan dan pembangunan negara lain, khususnya Indonesia. Kontribusi ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana dinamika politik domestik di negara besar dapat memengaruhi strategi pembangunan negara berkembang. Dari sisi praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk mengedepankan strategi respons adaptif melalui diversifikasi kemitraan internasional, penguatan birokrasi nasional, serta pembangunan kemandirian strategis. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada studi empiris mengenai dampak konkret kerja sama Indonesia–Tiongkok di sektor infrastruktur, energi, maupun pertahanan. Kajian komparatif

dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya juga berpotensi memberikan perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana transformasi kepemimpinan Xi Jinping membentuk konfigurasi ketahanan kawasan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi konseptual, tetapi juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih aplikatif dan relevan dengan dinamika geopolitik kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Mutia, A. N., Nurlinda, I., & Astriani, N. (2022). PENGATURAN PEMBANGUNAN FOOD ESTATE PADA KAWASAN HUTAN UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(2), 224–240. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.259>
- Bernstein, H. (1971). Modernization theory and the sociological study of development*. *The Journal of Development Studies*, 7(2), 141–160. <https://doi.org/10.1080/00220387108421356>
- Blühdorn, I. (2025). Ecological Ungovernability and the Transition to Postliberal Modernity: On the Dialectic of the Eco-Emancipatory Project. *European Journal of Social Theory*. <https://doi.org/10.1177/13684310251330872>
- Brown, K., & Bērziņa-Čerenkova, U. A. (2018). Ideology in the Era of Xi Jinping. *Journal of Chinese Political Science*, 23(3), 323–339. <https://doi.org/10.1007/s11366-018-9541-z>
- Chaireni, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*.
- Doyon, J. (2018). clientelism by design : personnel Politics Under Xin Jinping. *Journal Cuurent Chinese Affairs*.
- Faizah, Y. N., Musyarofah, S., & Anggono, A. (2021a). Fraud Detection in healthcare organization: A Bibliometric Analysis Approach. In *International Colloquium on*



- Forensics Accounting and Governance (ICFAG)* (Vol. 1, Issue 1).
- Faizah, Y. N., Musyarofah, S., & Anggono, A. (2021b). Fraud Detection in healthcare organization: A Bibliometric Analysis Approach. In *International Colloquium on Forensics Accounting and Governance (ICFAG)* (Vol. 1, Issue 1).
- Fitriani, E. (2021). Linking the impacts of perception, domestic politics, economic engagements, and the international environment on bilateral relations between Indonesia and China in the onset of the 21 st century. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 10(2), 183–202. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1955437>
- Gueorguiev, D. D. (2018). *China Perspectives*.
- Guo, B. (2020). A Partocracy with Chinese Characteristics: Governance System Reform under Xi Jinping. *Journal of Contemporary China*, 29(126), 809–823. <https://doi.org/10.1080/10670564.2020.1744374>
- Hameiri, S., & Jones, L. (2016). Rising powers and state transformation: The case of China. *European Journal of International Relations*, 22(1), 72–98. <https://doi.org/10.1177/1354066115578952>
- Hu, W. (2019). Xi Jinping's 'major country diplomacy': The role of leadership in foreign policy transformation. *Journal of Contemporary China*, 28(115), 1–14. <https://doi.org/10.1080/10670564.2018.1497904>
- Iksan, M., Soong, J.-J., & Liang, Y.-C. (2025). Opportunities and Challenges of China's Economic and Political Development under the Third Term of Xi Leadership: A Viewpoint of Indonesia. *The Chinese Economy*, 58(1), 61–78. <https://doi.org/10.1080/10971475.2024.2373639>
- Kang, X. (2018). Moving Toward Neo-Totalitarianism: A Political-Sociological Analysis of the Evolution of Administrative Absorption of Society in China. *Nonprofit Policy Forum*, 9(1). <https://doi.org/10.1515/npf-2017-0026>
- Kazuko, K. (2020). Politics under Xi Jinping: Centralization and its Implications. *Public Policy Review*.
- Lee, S. (2017). An Institutional Analysis of Xi Jinping's Centralization of Power. *Journal of Contemporary China*, 26(105), 325–336. <https://doi.org/10.1080/10670564.2016.1245505>
- Li, J., Van Assche, A., Li, L., & Qian, G. (2022). Foreign direct investment along the Belt and Road: A political economy perspective. *Journal of International Business Studies*, 53(5), 902–919. <https://doi.org/10.1057/s41267-021-00435-0>
- Mardhani, D., Josias, A., Runturambi, S., & Hanita, D. M. (2020). KEAMANAN DAN PERTAHANAN DALAM STUDI KETAHANAN NASIONAL GUNA MEWUJUDKAN SISTEM KEAMANAN NASIONAL SECURITY AND DEFENCE IN NATIONAL RESILIENCE STUDIES TO REALIZE A NATIONAL SECURITY SYSTEM.
- Nur Faizah, Y., Medistya Anke Priyono, F., Toyyib KAP Achsin Handoko Tomo Malang, M., & Sakti Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudia Husada Madura, E. (2024). TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENELITIAN ANTI-MONEY LAUNDERING DENGAN PENDEKATAN BIBLIOMETRIC APPROACH. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 24, 2623–2650. <https://doi.org/10.30596/16206>
- Rameshan, P. (2024). Leadership Behaviour in Covid-19 Crisis Response: A Personal Strategy Proposition. *IIM Kozhikode Society & Management Review*, 13(1), 44–69. <https://doi.org/10.1177/22779752221095277>
- Roxborough, I. (1988). Modernization Theory Revisited. *A Review Article. Comparative Studies in Society and History*, 30(4), 753–761. <https://doi.org/10.1017/S0010417500015528>
- Sakti, E., Faizah, Y. N., & Maduratna, E. S. (2024). MANIPULASI LABA DI SEKTOR KESEHATAN: STUDI SEBELUM, SAAT,



- DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 80–109. <https://doi.org/10.20473/baki.v9i1.50484>
- Sarjito, A. (2024). ERANGKA STRATEGIS ADOPSI E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI SEKTOR PERTAHANAN. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 4, 58–74.
- Tarjo, T., Faizah, Y. N., Toyyib, Moh., Sakti, E., & Pramudita, H. E. (2021). Uncovering of Potential Fraud in the Preparation of Village Planning and Budgeting Documents in Madura. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 234. <https://doi.org/10.24843/jiab.2021.v16.i02.p04>
- Tipps, D. C. (1973). Modernization Theory and the Comparative Study of National Societies: A Critical Perspective. *Comparative Studies in Society and History*, 15(2), 199–226. <https://doi.org/10.1017/S0010417500007039>
- Toyyib, M., Faizah, Y. N., A'la, M., & Ismail, M. (2020). Potential Use of Assets in Small Business Restaurants in Indonesia. In *International Colloquium on Forensics Accounting and Governance (ICFAG)* (Vol. 1, Issue 1).
- Tsang, S., & Cheung, O. (2022). Has Xi Jinping made China's political system more resilient and enduring? *Third World Quarterly*, 43(1), 225–243. <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.2000857>
- Yeremia, A. E. (2022). Indonesian diplomats' and foreign policy scholars' perceptions and their implications on Indonesian foreign ministry bureaucratic responses to a rising China. *The Pacific Review*, 35(3), 529–556. <https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1851293>
- Yoshimatsu, H. (2022). Indonesia's response to the Belt and Road Initiative and the Indo-Pacific: A pivotal state's hedging strategy. *Asian Politics & Policy*, 14(2), 159–174. <https://doi.org/10.1111/aspp.12629>
- Wahyuni. (2022). Menyingkap Tabir Potensi Fraud Pajak Penghasilan Youtuber Lokal. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(3). <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i3.003>
- Zemin, J., Cheng, L., & White, L. (1998). The Fifteenth Central Committee of the Chinese Communist Party: Full-Fledged Technocratic Leadership with Partial Control. In *Source: Asian Survey* (Vol. 38, Issue 3).